

Judul : Belum Ada Kepastian Saudi Terima Jemaah
Tanggal : Jumat, 18 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Biaya Haji Diusulkan Rp 45 Juta

Belum Ada Kepastian Saudi Terima Jemaah

KOMISI VIII DPR menyambut baik usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 45 juta per jemaah haji. Usulan Pemerintah ini akan dibahas dalam Panja (Panita Kerja) BPIH Komisi VIII.

Anggota Komisi VIII DPR Achmad mengingatkan, pembahasan penyelenggaraan haji tahun ini sudah masuk dalam kondisi *emergency*. Sebab, DPR mulai pekan depan sudah mulai me-

lakukan reses hingga 14 Maret 2022. Sehingga mayoritas anggota sudah tidak lagi berkantor namun sudah melakukan berbagai rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Belum lagi sampai saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian dibuka tidaknya penyelenggaraan haji untuk tahun ini. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan skenario pemberangkatan haji kloter per-

tama pada 5 Juli 2022.

"Saran kami kalau tidak menyalahi tatib (tata tertib) kita, untuk pembahasan panja (BPIH) dengan pemerintah, mungkin dengan virtual tidak ada masalah sehingga waktu tidak terbuang. Ini kan waktu *emergency*, sangat darurat karena 5 Juli para jemaah haji sudah diberangkatkan," saran politisi senior Fraksi Partai Demokrat ini di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi VIII Bukhori

Yusuf menambahkan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pembahasan panja BPIH hanya memiliki waktu maksimal 30 hari. Dengan skenario pemberangkatan haji pertama mulai 5 Juli 2022, maka persiapan pemerintah dalam pemberangkatan para jemaah kini tersisa sekitar kurang lebih 3 bulan.

"Karena itu kita berharap kepada pemerintah memastikan berapa kira-kira waktu yang paling lambat atau cepat untuk melakukan persiapan. Apakah misalnya 15 hari dari hari keberangkatan atau 10 hari dan seterusnya," ucapnya.

Terkait biaya pengenaan haji per jemaah Rp 45 juta, dia memastikan usulan ini akan dibahas lebih detail dalam panja. "Saya kira (Panja) BPIH menjadi sangat penting, mendasar karena basis untuk kita menemukan angka di BPIH itu dari sana," jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq meminta pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa panitia siap memberangkatkan para jemaah di tengah pandemi Covid-19. Sebab dari informasi yang diperolehnya dari para jemaah yang baru balik dari penyelenggaraan umrah, ternyata travel jemaah (umroh) lebih siap daripada pemerintah.

"Kalimat itu terjadi di mana-mana, dan saya mendapatkan beberapa video dan foto di mana orang tua yang ikut umrah itu betul-betul keteteran dan sebagainya. Jadi tolong ini jadi perhatian terutama direktur yang langsung kepada persiapan umrah," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas belum bisa memastikan bisa terlaksananya pemberangkatan haji tahun ini. Sebab, pihaknya belum mendapat kepastian apakah Pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.

"Namun seperti kami sampaikan, belum ada informasi. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan sampai saat ini Kemenag belum mendapat undangan dari Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MoU tentang persiapan ibadah haji," jelasnya.

Tapi yang jelas, pengisian kuota haji mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan adalah jemaah haji yang berangkat pada tahun 2020. Adapun skenario penyelenggaraan ibadah haji menyusul adanya varian baru Covid-19, Pemerintah telah melakukan mitigasi dengan 3 opsi.

"Yakni kuota penuh, kuota terbatas dan terakhir, tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali seperti dua tahun lalu. Namun Pemerintah akan terus dan tetap bekerja menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh," jelas Yaquut.

Terkait usulan BPIH, pihaknya mengusulkan untuk haji reguler, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji sebesar Rp 45 juta. Pembiayaan tersebut terdiri dari biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Makkah dan Madinah, biaya Visa, dan biaya PCR di Arab Saudi. Sementara komponen yang dibebankan dari dana pembiayaan tidak langsung, total sebesar Rp 8,9 triliun lebih. ■ KAL